

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan supervisi manajerial yang dilakukan oleh pengawas sekolah di SMA Negeri Seribu Bukit Kabupate Gayo Lues, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen kurikulum yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen kurikulum karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial, (2) evaluasi manajemen kurikulum yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.
2. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen kesiswaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen kesiswaan karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial, (2) evaluasi manajemen kesiswaan yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya juga kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tentang masalah manajemen kesiswaan, (4) Manajemen kesiswaan pada SMA Negeri Seribu Bukit memiliki beberapa permasalahan terutama menurunnya kualitas penerimaan siswa baru. Akan tetapi pengawas sekolah sekolah tidak dapat menjalankan peranannya karena tidak memiliki program kerja yang terencana, terpola, dan terprogram sehingga tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas manajemen kesiswaan.

3. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen sarana dan prasarana karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial sarana dan prasarana, (2) evaluasi manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya juga kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tentang masalah manajemen sarana dan prasarana.
4. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen ketenagaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen ketenagaan karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial ketenagaan, (2) evaluasi

manajemen ketenagaan yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya juga kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tentang masalah manajemen ketenagaan, (4) Pelaksanaan supervisi manajemen ketenagaan oleh pengawas sekolah pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah banyak menemukan kendala dalam hal ini, akan tetapi karena pengawas sekolah tidak melaksanakan supervisi manajerial aspek manajemen ketenagaan berdasarkan program kerja pengawasan yang dibuat berdasarkan analisis permasalahan, maka supervisi manajerial yang dilaksanakan tidak dapat memberi kontribusi yang besar kepada kepala sekolah dalam menghadapi persoalan ketenagaan di sekolah. Pengawas sekolah belum dapat menjalankan peranannya sebagai motivator, fasilitator, evaluator dan group leader.

5. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen keuangan yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial keuangan, (2) evaluasi manajemen keuangan yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya juga kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tentang masalah manajemen keuangan.

6. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen hubungan dengan masyarakat yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen hubungan dengan masyarakat karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial keuangan, (2) evaluasi manajemen hubungan dengan masyarakat yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya juga kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tentang masalah manajemen hubungan dengan masyarakat, (4) pengawas sekolah belum dapat melakukan perannya sebagai mediator dan fasilitator dalam pembinaan hubungan kepala sekolah dengan pihak lain maupun hubungan kepala sekolah dengan sesama warga sekolah
7. Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen layanan khusus yang dilakukan oleh pengawas sekolah belum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas manajemen layanan khusus karena (1) supervisi yang dilakukan tidak berdasarkan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya yang dituangkan kedalam program supervisi manajerial keuangan, (2) evaluasi manajemen layanan khusus yang dilakukan tidak berdasarkan analisis permasalahan sehingga hasilnya juga kurang mengenai sasaran, (3) kurangnya sinkronisasi program antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut tentang masalah manajemen layanan khusus.

## 5.2. IMPLIKASI PENELITIAN

Pelaksanaan supervisi manajerial aspek manajemen kurikulum yang dilakukan oleh pengawas sekolah bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen kurikulum di SMA Negeri Seribu Bukit. Akan tetapi tujuan tersebut belum tercapai karena pengawas sekolah melakukan supervisi tidak terpola, tidak terprogram, dan tidak terencana sehingga tidak membawa manfaat yang besar bagi kepala sekolah, bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum, bahkan tidak membawa manfaat besar bagi pengawas sekolah itu sendiri. Salah satu sebabnya adalah hasil supervisi tidak disampaikan kepada sekolah yang disupervisi, juga tidak disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai pemberi tugas kepada pengawas sekolah untuk melaksanakan supervisi tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini disebabkan pada tahun-tahun pelajaran sebelumnya laporan yang diberikan oleh pengawas sekolah belum dijadikan bahan kajian dalam menetapkan kebijakan pendidikan. Sehingga pihak sekolah belum merasa keberadaan pengawas sekolah sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas pengelolaan sekolah. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penetapan kedudukan Pengawas Sekolah dalam surat keputusan sebagai tindak lanjut Permenegpan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Disamping itu pengawas sekolah dapat berpartisipasi dan mengaktifkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

sebagai wadah pembinaan kepala sekolah dimana kepala sekolah dapat menjadi pembinanya.

Oleh karena aspek manajemen kurikulum dan pengajaran satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan aspek manajemen kesiswaan, aspek manajemen ketenagaan, aspek manajemen sarana dan prasarana, aspek manajemen keuangan, aspek manajemen hubungan dengan masyarakat, dan aspek manajemen layanan khusus, maka implikasi dari penelitian ini adalah sama.

### **5.3. SARAN**

Dengan memperhatikan hasil pembahasan pelaksanaan supervisi manajerial oleh pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah binaan bagi seorang seorang pengawas sekolah disampaikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Dalam menyusun rencana kerja program sekolah, agar melibatkan peran pengawas sekolah, melakukan konsultasi dengan pengawas sekolah, sebagai pembina sekolah pengawas sekolah memiliki catatan-catatan pada setiap sekolah binaannya.
  - b. Dalam pembinaan ketenagaan agar kepala sekolah melibatkan peran pengawas sekolah baik secara formal maupun non formal mengingat hubungan kepala sekolah dengan guru dan staf adalah hubungan antara atasan dan bawahan sehingga sering terjadi hambatan komunikasi,

sedangkan pengawas sekolah memiliki hubungan kemitraan dengan kepala sekolah dan guru sehingga dapat melaksanakan peran mediasi.

- c. Menjadikan pengawas sekolah sebagai mitra kerja dan berkonsultasi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan sekolah, sehingga sekolah tidak hanya dalam pasif dalam pelaksanaan supervisi manajerial akan tetapi sebaliknya aktif dalam pelaksanaan supervisi manajerial oleh pengawas sekolah.
2. Kepada pengawas sekolah pembina disampaikan rekomendasi sebagai berikut.
    - a. Dalam melaksanakan supervisi manajerial agar mengacu kepada peraturan, petunjuk pelaksanaan supervisi manajerial yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan program pengawasan dan tahap-tahap pelaksanaannya
    - b. Agar hasil pelaksanaan supervisi manajerial disampaikan dalam bentuk laporan kepada kepala sekolah dan dimasukkan kedalam sistem manajemen informasi sekolah. Disamping itu juga menyampaikan laporan pelaksanaan supervisi manajerial kepala Kepala Dinas sebagai pemberi tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban, terlepas dari ditanggapi atau tidaknya laporan tersebut.
    - c. Pengawas sekolah menciptakan situasi hubungan kemitraan dengan kepala sekolah sehingga kehadirannya ke sekolah dapat menjadi bagian dari kegiatan sekolah dari pada menekankan kepada inspeksi atau pemeriksaan.
  3. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Pengawas sekolah telah ditetapkan sekolah binaannya, sehingga pengawas sekolah dapat mengetahui lebih baik kompetensi kepala sekolah binaannya. Dengan demikian laporan supervisinya dapat dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang pembinaan pendidikan di daerah
- b. Agar dapat memberdayakan pengawas sekolah sebagai mitra Kepala Dinas sebagai mediator antara Kepala Dinas dan sekolah. Hal ini mengingat secara struktur pengawas berada dalam srtuktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dalam melaksanakan tugas kepengawasan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan hubungan pengawas sekolah dengan kepala sekolah ditetapkan sebagai pembina kepala sekolah tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas.
- c. Memberdayakan MKKS sebagai salah satu wadah pembinaan kepala sekolah oleh pengawas sekolah.
- d. Menetapkan dalam surat keputusan tentang kedudukan, tugas pokok, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang pengawas sekolah sesuai dengan amanat Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun, dan dapat disosialisasikan kepada sekolah-sekolah dan pemerhati pendidikan.